

AKTUALISASI POLITIK ISLAM INDONESIA : BELAJAR DARI PEROLEHAN SUARA PARTAI ISLAM DALAM PEMILU¹

Yusuf Hamdan^{}**

Abstrak

Memahami Islam dapat dilakukan dalam tiga matra: Islam dalam cita, citra, dan fakta. Atau Islam dalam eksistensinya sebagai ajaran, Islam sebagaimana dipersepsi manusia, atau Islam sebagai fakta sosial. Tulisan ini menyajikan rekaman faktual proses aktualisasi ajaran Islam dalam lembaga politik atas dasar perolehan suara dalam pemilu yang telah diselenggarakan 8 kali di Indonesia.

Secara statistik, hampir 90 persen penduduk Indonesia beragama Islam. Jumlah mayoritas ini tidak pernah menjelma secara representatif dalam bentuk dukungan terhadap partai-partai Islam. Sesuai data 8 kali pemilu menunjukkan tidak sekalipun partai Islam memenangkan pemilu, baik pada pemilu bebas, yaitu pemilu 1955 dan pemilu 1999, maupun dalam pemilu-pemilu Orde Baru yang berada dalam tekanan.

Dukungan terhadap partai-partai Islam cenderung menurun dalam masa hampir 50 tahun penyelenggaraan pemilu. Sehingga dengan demikian, ke depan, harapan partai Islam untuk memenangkan persaingan politik hanya dapat terselenggara dengan melakukan kerjasama dengan kekuatan politik lain untuk berbagi peran politik secara proporsional.

Kata Kunci : Suara Partai Islam : Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi

1 Pendahuluan

Mengkaji politik Islam Indonesia dapat dilihat dari matra cita, citra, dan fakta. Islam dalam “cita” adalah Islam normatif sebagaimana dijelaskan

¹ Disampaikan dalam diskusi Pusat Pengkajian Islam (PUSKAJI) Unisba, Rabu 16 Juli 2003.

^{**} Yusuf Hamdan, Drs., M.Si, adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi UNISBA

kitab suci (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi. Umpamanya keyakinan seorang Muslim mengenai Islam merupakan agama satu-satunya yang akan diterima di sisi Allah yang didasarkan kepada ayat Al-Qur'an², atau Islam merupakan ajaran paling tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi darinya, yang didasarkan kepada sunnah Nabi.

Islam dalam “citra” adalah Islam sebagaimana ada dalam benak manusia, yang menganut maupun yang menentangnya. Dalam hal ini ada Islam menurut saya dan Islam menurut Anda. Ada Islam menurut George W. Bush dan ada Islam Menurut Usamah Bin Ladin.

Islam dalam “fakta” adalah Islam sebagai realitas sosiologis, yang dalam kadar tertentu dapat dinyatakan dalam statistik. Umpamanya warganegara Indonesia pemeluk agama Islam hampir mencapai 90 persen. Atau Partai Amanat Nasional memperoleh sekitar 7,12 persen suara dalam pemilu 1999.

Kekisruhan pemahaman terjadi apabila seorang Muslim tidak dapat membedakan medan aktualisasi ini, sehingga respons sikap maupun pilihan perilaku acap kali tidak relevan dengan masalah yang dihadapi.

Kali ini saya membawakan rekaman faktual tentang aktualisasi ajaran Islam dalam berpolitik di Indonesia melalui eksistensi partai Islam selama kurang lebih setengah abad, berdasarkan perolehan suara partai Islam dalam 8 kali pemilu.

Aktualisasi Islam dalam wujud partai politik Islam merupakan formalisasi ajaran. Dengan demikian pasang surut partai Islam di Indonesia merupakan satu indikasi pasang surut Islam simbolis, yang menghendaki ajaran Islam tercermin dalam kelembagaan politik formal.

2 Data Pemilu Di Indonesia

Data perolehan suara partai Islam dalam Pemilu di Indonesia sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 1999 merupakan rekaman faktual mengenai bagaimana umat Islam Indonesia mengaktualisasikan ajaran Islam dalam fora politik. Data-data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah

² Q.S Ali-Imran:19.

data resmi pemerintah. Mungkin ada kesangsian mengenai reliabilitas beberapa data tersebut menyangkut pemilu pada tahun tertentu.

Namun demikian secara keseluruhan data ini mencerminkan bagaimana upaya-upaya aktualitas ajaran Islam dalam partai politik di Indonesia yang berlangsung selama kurang lebih 50 tahun. Angka-angka perolehan suara partai Islam merupakan hasil proses dialektis penerapan keyakinan yang berkorespondensi dengan realitas sosial dalam dimensi ruang dan waktu.

2.1 Pemilu 1955

Pemilu 1955 merupakan Pemilu pertama yang diselenggarakan pemerintah Indonesia sejak merdeka dari penjajahan pada tahun 1945. Menurut banyak kalangan pemilu ini diselenggarakan dengan sangat demokratis. Boleh dikatakan semua aliran politik mendapat ruang berekspresi termasuk ideologi Komunis yang kini secara formal telah dinyatakan terlarang.

Pemilu ini dimenangkan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang memperoleh 8.434.653 suara (22,32 %). Kemenangan partai Bung Karno merupakan satu hal yang logis karena saat itu Bung Karno merupakan tokoh yang paling populer di kalangan masyarakat.

Namun demikian perolehan suara partai Islam pun dalam pemilu ini cukup baik. Dalam peringkat 10 besar ada 4 partai Islam, yaitu: Masyumi sebagai *runner up* memperoleh 7.903.886 (20,92 %), Nahdlatul Ulama (NU) pada urutan ke-3 memperoleh 6.955.141 (18,41 %), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) pada urutan ke-5 memperoleh 1.091.160 (2,89 %), dan Pergerakan Tarbiyah Islam (Perti) pada urutan ke-10 memperoleh 483.014 suara (1,28 %).

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR (Peringkat 10 Besar)

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2.	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7.	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,28	4

Sumber: www.kpu.go.id

Sedangkan hasil pemilu untuk anggota konstituante perolehan suara partai-partai adalah sebagai berikut

Perolehan Suara Pemilu 1955 Untuk Anggota Konstituante (Peringkat 10 Besar)

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	9.070.218	23,97	119
2.	Masyumi	7.789.619	20,59	112
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.989.333	18,47	91
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.232.512	16,47	80
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.059.922	2,80	16
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	988.810	2,61	16
7.	Partai Katolik	748.591	1,99	10
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	695.932	1,84	10
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	544.803	1,44	8
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	465.359	1,23	7

Sumber: www.kpu.go.id

Data pemilu ini menunjukkan bahwa dukungan ummat Islam

Indonesia terhadap partai Islam secara akumulatif cukup besar (43,5 persen), akan tetapi tidak sedemikian besar sehingga mencapai mayoritas mutlak (masih kurang dari 50 persen). Perolehan ini mungkin menimbulkan keprihatinan tokoh-tokoh partai Islam, mengapa tidak semua umat Islam Indonesia mendukung partai yang bertujuan untuk memajukan umat Islam.

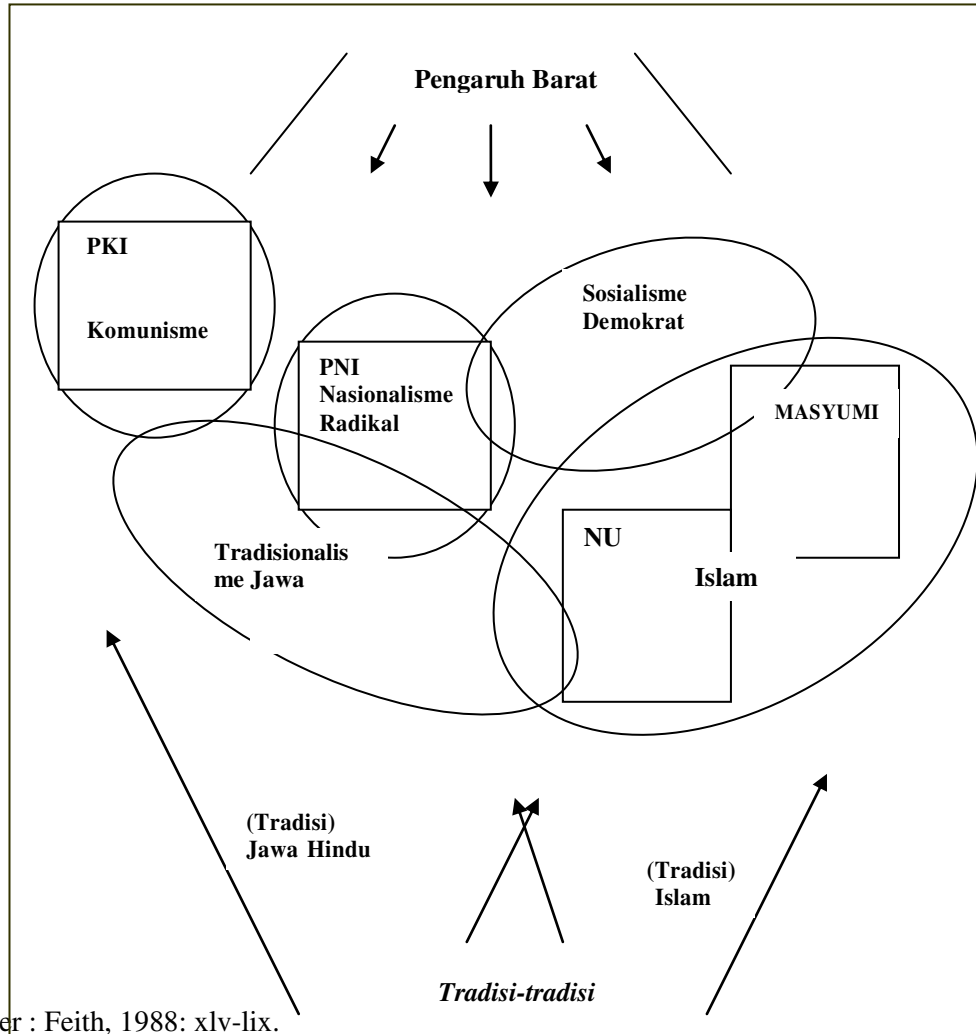
Hasil pemilu pertama menunjukkan kepada kita bahwa Islam *nomina* yang di atas kertas dalam posisi mayoritas (hampir 90 persen) tidak serta merta menjadi kekuatan aktual dalam realitas politik yang mengambil bentuk lebih formal, karena dalam kenyataannya, realitas politik umat Islam Indonesia (khususnya Islam di pulau Jawa) memperlihatkan wajah ideologi yang majemuk sebagai campuran berbagai aliran dan tradisi pemikiran, sebagaimana yang secara kuat diungkapkan dalam tipologi santri, abangan, dan priyayi oleh Clifford Geertz.

Lebih terang lagi apa yang dijelaskan oleh Herbert Feith mengenai aliran-aliran pemikiran politik di Indonesia. Salah satu data yang digunakan Feith adalah perolehan suara partai-partai politik dalam pemilu 1955.

Berdasarkan 4 besar partai politik peraih suara terbanyak pada pemilu 1955 (PNI, Masyumi, NU, dan PKI), Feith membuat bagan aliran pemikiran politik Indonesia yang didasarkan atas pengaruh tradisi Jawa Hindu, Islam dan Barat. Menurut Feith, ada lima aliran pemikiran politik di Indonesia yang terdiri dari: Tradisionalisme Jawa, Islam, Nasionalisme Radikal, Sosiolisme Demokrat, dan Komunisme.

Pemikiran politik Tradisionalisme Jawa berpengaruh lumayan besar pada PNI, dan dalam kadar yang lebih kecil pada PKI, dan NU. Sedangkan aliran pemikiran Islam berpengaruh sangat besar atau mendasari Masyumi dan NU. Sosiolisme Demokrat mempengaruhi Masyumi maupun PNI. Sedangkan Komunisme mempengaruhi atau mendasari PKI. Tradisionalisme Jawa merupakan pengaruh dari tradisi Hindu Jawa pra Islam, sedangkan Aliran pemikiran Islam bersumber pada ajaran (tradisi) Islam, sedangkan Sosiolisme Demokrat dan Komunisme merupakan pengaruh pemikiran politik Barat.

Aliran Politik di Indonesia



Sumber : Feith, 1988: xlv-lix.

2 Partai Politik Dan Aliran Pemikiran Politik

Sekalipun diakui Feith bahwa bagannya tidak sepenuhnya menggambarkan kekuatan politik di Indonesia saat itu (partai-partai agama non-Islam yang kecil, militer, dan lain-lain belum atau tidak dimasukkan), bagan ini dengan segala kekurangannya masih tetap memiliki kemampuan untuk menjelaskan fenomena kekuatan politik di Indonesia, bahkan sampai saat ini.

2.1 Pemilu 1971

Pemilu berikutnya 16 tahun kemudian setelah pergantian rejim dari Orde Lama ke Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Dari 10 peserta pemilu, sebagian besar partai ikut pemilu 1955. Wajah baru pemilu kali ini adalah Golkar, Parmusi, dan Partai Murba (peserta pemilu 1955 di luar 10 besar). Sedangkan tiga partai peserta pemilu 1955 dalam 10 besar yang tidak lagi ikut adalah Masyumi, PKI, dan PSI. Masyumi dan PSI dibubarkan oleh Orde Lama, sedangkan PKI dibubarkan di awal Orde Baru.

Hasil Pemilu 1971 memperlihatkan inkonsistensi dengan hasil pemilu 1955, karena perolehan suara hampir seluruh partai menurun drastis tersedot oleh kekuatan sangat besar pendatang baru Golongan Karya, kecuali NU yang mengalami kenaikan dari 18,41 menjadi 18,68 persen. Partai Islam lainnya Parmusi memperoleh 5,36 persen, PSII menurun dari 2,89 menjadi 2,39, dan Perti dari 1,28 menjadi 0,69 persen. Jika Parmusi lebih kurang merupakan metamorfosis Masyumi, maka telah terjadi penurunan perolehan suara sangat besar.

Jika perolehan suara partai Islam dijumlahkan, pencapaiannya hanya tinggal 27 persen. Dari hasil pemilu ini terlihat aktualisasi ajaran Islam dalam partai politik menyusut pada awal rejim Orde Baru. Sejak kemenangan Golkar, inisiatif politik secara perlahan beralih dari partai politik ke birokrasi dan militer.

Golkar disiapkan sebagai kekuatan untuk mencegah kekuatan Islam berkuasa. Bahkan dalam pemilu 1971 kampanye Golkar diambil alih oleh Departemen Dalam Negeri serta Departemen Pertahanan dan Keamanan (lihat Liddle, 1992:3-5, 37).

Masa Orba ditandai oleh surutnya formalisme Islam dalam lembaga politik. Sesungguhnya ini bukan kekhususan bagi partai-partai Islam, sebab

penurunan kekuatan politik juga dialami oleh partai nasionalis. Ada semangat anti partai yang meluas bersamaan dengan menaik (dinaikkan)-nya peran Golongan Karya, yang diposisikan sebagai bukan partai politik, melainkan OPP-organisasi peserta pemilu.

Sejak 1971 telah lahir organisasi yang diposisikan bukan partai, namun diandalkan sebagai mesin politik untuk memenangkan dukungan politik dalam pemilu.

Perolehan Suara Pemilu 1971 Untuk anggota DPR

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	Golkar	34.348.673	62,82	236
2.	NU	10.213.650	18,68	58
3.	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4.	PNI	3.793.266	6,93	20
5.	PSII	1.308.237	2,39	10
6.	Parkindo	733.359	1,34	7
7.	Katolik	603.740	1,10	3
8.	Perti	381.309	0,69	2
9.	IPKI	338.403	0,61	0
10.	Murba	48.126	0,08	0
	Jumlah	2160.101	595	360

Sumber: www.kpu.go.id

2.2 Pemilu 1977

Pemilu ke-3 atau ke-2 di masa Orde Baru diselenggarakan pada tahun 1977 diikuti hanya oleh tiga kekuatan politik, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP hasil fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI, hasil fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba).

Pemilu 1977 menghasilkan perolehan suara yang mirip dengan hasil pemilu 1971. Golkar di tempat pertama dengan 62,11 persen, turun kurang dari 1 persen. PPP di tempat kedua dengan 29,29, menaik sekitar 2 persen, dan PDI di tempat terakhir dengan 8,60 persen, atau menurun sekitar 1,5

persen.

Perolehan Suara Pemilu 1977 Untuk anggota DPR

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1971)	Keterangan
1.	Golkar	39.750.096	62,11	232	62,80	- 0,69
2.	PPP	18.743.491	29,29	99	27,12	+ 2,17
3.	PDI	5.504.757	8,60	29	10,08	- 1,48
	Jumlah	63.998.344	100,00	360	100,00	

Sumber: www.kpu.go.id

Pemilu 1977 dipandang sebagai “kemenangan” PPP atas Golkar. Bagaimana tidak, setelah dilakukan berbagai kegiatan prakampanye untuk membatasi langkah partai, khususnya PPP, perolehan partai ini malah meningkat.

Di antara langkah-langkah prakampanye pemerintah untuk mengukuhkan kedudukan Golkar antara lain pada tahun 1975 pemerintah mengajukan ke DPR dua undang-undang masing-masing tentang organisasi politik dan tata cara penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk mencegah pegawai negeri sipil bergabung dalam partai.

Menjelang kampanye Kaskopkamtib Laksamana Soedomo mengumumkan dibongkarnya komplotan anti-pemerintah yang disebut Komando Jihad. Dijelaskan komplotan ini tidak ada hubungannya dengan PPP, tapi banyak orang yakin tujuan pengungkapan ini untuk menyudutkan PPP.

Selain itu banyak tindakan represi lainnya terhadap tokoh maupun simpatisan PPP dalam rangka mencegah meluasnya dukungan terhadap partai yang mewakili aspirasi umat Islam ini.

2.3 Pemilu 1982

Perolehan suara partai Islam dalam pemilu 1982 mengalami penurunan sekitar 1,5 persen dari perolehan pemilu 1977, yaitu dari 29,29 menjadi 27,78 persen. Begitu juga PDI menurun sekitar 0,70 persen dari 8,60 menjadi 7,88 persen. Sedangkan Golkar semakin kokoh dengan kenaikan sekitar 2 persen dari 62,11 menjadi 64,34 persen.

No.	Partai	Suara DPR	%	Kursi	% (1977)	Keterangan
-----	--------	-----------	---	-------	----------	------------

1. Golkar	48.334.724	64,34	242	62,11	+ 2,23
2. PPP	20.871.880	27,78	94	29,29	- 1,51
3. PDI	5.919.702	7,88	24	8,60	- 0,72
Jumlah	75.126.306	100,00	364	100,00	

Sumber: www.kpu.go.id

2.4 Pemilu 1987

Perolehan suara PPP sebagai representasi politik formal umat Islam semakin menurun. PPP kehilangan hampir 12 persen, menurun dari 27,78 pada pemilu 1987 menjadi hanya 15,97 persen. PDI mengalami kenaikan dari 7,88 persen pada pemilu 1982 menjadi 10,87 persen. Sedangkan Golkar semakin perkasa dengan kenaikan 8,82 persen dari 64,34 menjadi 73,16 persen.

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1982)	Keterangan
1.	Golkar	62.783.680	73,16	299	68,34	+ 8,82
2.	PPP	13.701.428	15,97	61	27,78	- 11,81
3.	PDI	9.384.708	10,87	40	7,88	+ 2,99
	Jumlah	85.869.816	100,00	400		

Sumber: www.kpu.go.id

Menurut Liddle (1993:92-96), penurunan perolehan suara PPP berkaitan dengan merosotnya dukungan NU terhadap PPP. Sebagaimana diketahui, akibat pelbagai kekecewaan yang dialami di PPP, NU pada tahun 1984 menyatakan diri sebagai organisasi sosial dakwah dan pendidikan yang non-politik seraya membebaskan warganya untuk menyalurkan hak pilih dalam pemilu kepada kekuatan politik yang ada dan tidak mengikat diri kepada PPP. Penyebab lain kemerosotan PPP karena pada pemilu 1987 ini untuk pertama kali PPP memasuki arena pemilu tanpa tanda gambar Ka'bah yang kharismatis buat umat Islam.

Pemilu 1987 juga memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan kubu nasionalis yang berhimpun dalam PDI. Kenaikan suara Golkar dan PDI diimbangi oleh penurunan PPP. Dengan demikian, pemilih yang berpindah

dari PPP tidak melulu ke Golkar melainkan juga ke PDI. Hal ini membuka perspektif, dalam keadaan tertentu dapat saja pemilih Islam memberikan suara kepada partai nasionalis.

2.5 Pemilu 1992

Pemilu 1992 memberikan kenaikan yang tidak cukup berarti kepada PPP yang memperlihatkan kenaikan persentase dari 15,97 pada pemilu 1987 menjadi 17,01 pada pemilu 1992 (naik sekitar 1 persen). PDI mengalami kenaikan yang signifikan sekitar 4 persen dari 10,87 persen pada pemilu 1987 menjadi 14,89 persen pada 1992 sehingga persentase perolehan kedua partai ini hanya berselisih sekitar 2 persen saja. Sedangkan Golkar mengalami penurunan yang cukup berarti sekitar 5 persen dari 73,16 persen pada pemilu 1987 menjadi 68,10 persen pada pemilu 1992.

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1987)	Keterangan
1.	Golkar	66.599.331	68,10	282	73,16	- 5,06
2.	PPP	16.624.647	17,01	62	15,97	+ 1,04
3.	PDI	14.565.556	14,89	56	10,87	+ 4.02
J		97.789.534	100,00	400	100,00	

Sumber : www.kpu.go.id

2.6 Pemilu 1997

Kemenangan Golkar pada pemilu 1997 menjadi kemenangan paling besar sepanjang sejarah pemilu Indonesia, dengan meraih 74,51 persen suara (naik 6,41 persen). Sementara itu PPP mendapat 22,43 persen (naik 5,43 persen dari pemilu 1992, dan PDI mendapat 3,06 persen suara (turun 11,84 persen dari perolehan pada pemilu 1992). Laju kebangkitan PDI terhambat dalam pemilu 1997, pemilu terakhir Orde Baru, oleh konflik internal antara Soeryadi dan Megawati.

Puncak perseteruan kedua kubu ditandai oleh penyerangan sekretariat PDI yang dikuasai kubu Megawati oleh kelompok seterunya yang diduga melibatkan pemerintah. Urusan penyerangan sekretariat PDI sampai saat ini masih terkatung-katung di pengadilan. PPP dan Golkar seperti mendapatkan

keuntungan dari konflik internal yang terjadi pada PDI. Penurunan suara PDI pada pemilu 1997 mirip dengan yang dialami PPP pada pemilu 1992.

No.	Partai	Suara	%	Kursi	% (1992)	Keterangan
1.	Golkar	84.187.907	74,51	325	68,10	+ 6,41
2.	PPP	25.340.028	22,43	89	17,00	+ 5,43
3.	PDI	3.463.225	3,06	11	14,90	- 11,84
	Jumlah	112.991.150	100,00	425	100,00	

Sumber: www.kpu.go.id

2.7 Pemilu 1999

Pemilu 1999 berlangsung mendahului musimnya karena jarak dari pemilu sebelumnya baru 2 tahun. Pemilu 1999 diselenggarakan dalam suasana baru pasca Orde Baru yang relatif bebas tanpa tekanan. Karenanya perolehan suara partai-partai merupakan cermin kekuatan dukungan yang nyata dari masyarakat.

Jika diperhatikan secara seksama, hasil pemilu 1999 mendekati perolehan suara pemilu pertama 1955, di mana dua ideologi besar, Nasionalisme dan Islam bersaing secara ketat dalam memperoleh dukungan. Penggabungan suara PDIP, Golkar, PKP, dan PDKB yang secara garis besar dapat dihitung mewakili ideologi nasionalis, mencapai 58 persen, sedangkan gabungan PPP, PKB, PAN, PBB, PK, dan PNU sebagai representasi dukungan terhadap ideologi Islam hanya mencapai sekitar 35 persen.

Mungkin ada yang keberatan dengan begitu saja memasukkan Golkar ke dalam kelompok nasionalis, sebab dalam Golkar saat ini terdapat sejumlah aktivis Islam yang berpengaruh. Jika dilakukan koreksi dengan menambahkan setengah perolehan Golkar ke dalam kekuatan Islam (artinya ada tambahan sekitar 10 persen) jumlahnya (45 persen) masih tetap lebih kecil dari dukungan terhadap kaum nasionalis.

Jika kita abaikan sementara perolehan suara pemilu-pemilu Orde Baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997) karena menurut berbagai kalangan bias terhadap tekanan politik penguasa, setidaknya tidak ada alasan untuk tidak membandingkan perolehan suara

partai-partai Islam dalam pemilu bebas sebelumnya (1955) dengan perolehan suara pemilu bebas berikutnya tahun 1999.

Data kedua pemilu memperlihatkan dukungan terhadap partai-partai Islam mengalami kemerosotan sebesar hampir 9 persen dari 43,5 persen di pemilu 1955 menjadi hanya 34,84 pada pemilu 1999.

Karena itu, berdasarkan sejarah perolehan suara partai-partai Islam selama hampir 50 tahun penyelenggaraan pemilu di Indonesia, tidak pernah secara sendiri maupun bersama-sama, persentase perolehan partai-partai Islam melebihi partai-partai nasionalis.

Perolehan Suara Pemilu 1999 (Peringkat 10 Besar)

No.	Nama Partai	Suara DPR	Kursi Tanpa SA	Kursi Dengan SA
1.	PDIP	35.689.073	153	154
2.	Golkar	23.741.749	120	120
3.	PPP	11.329.905	58	59
4.	PKB	13.336.982	51	51
5.	PAN	7.528.956	34	35
6.	PBB	2.049.708	13	13
7.	PK	1.436.565	7	6
8.	PKP	1.065.686	4	6
9.	PNU	679.179	5	3
10.	PDKB	550.846	5	3

Sumber: www.kpu.go.id

2.8 Pemilu 2004

Menurut sejumlah pengamat³, perolehan suara partai-partai dalam pemilu 2004 tidak akan banyak berubah dari apa yang mereka peroleh dalam pemilu 1999. Dari 6 partai politik Islam yang berada dalam urutan 10 besar belum tampak manuver-manuver yang sedemikian signifikan yang dapat

³ Lihat Arief Budiman, "Mencoba Membaca Peta Pemilihan Presiden 2004", Kompas, 13 Maret 2003.

menghasilkan lonjakan perolehan suara pada pemilu 2004. PPP terlihat datar saja, PKB masih diganjak dengan konflik kepengurusan kembar, PAN belum memperlihatkan strategi politik yang mencerminkan partai yang dikelola oleh banyak orang pandai, PBB demikian juga, PNU bahkan sudah kurang terdengar.

Partai yang memperlihatkan tanda-tanda perolehan suaranya akan meningkat adalah Partai Keadilan (PK), yang sekarang maju dengan nama PKS. Namun *positioning* PKS sangat jelas sebagai partai Islam sehingga kemungkinan penambahan suara PKS akan berakibat penurunan suara pada partai Islam yang lain, bukan penurunan pada partai nasionalis.

Sampai saat tulisan ini dibuat, belum ada peristiwa yang sedemikian penting yang akan memberikan lonjakan suara partai-partai Islam. Kehadiran partai-partai baru yang beridentitas Islam dalam pemilu 2004 mungkin akan semakin memperkecil dukungan umat Islam terhadap partai Islam tertentu karena perimpitan segmen, tetapi secara akumulatif tidak akan banyak mengubah dukungan terhadap partai-partai berideologi Islam.

3 Kesimpulan

1. Data perolehan suara partai Islam dalam 8 pemilu, satu pemilu Orde Lama, 6 pemilu Orde Baru, dan satu pemilu pasca gerakan reformasi, menjelaskan bahwa partai Islam belum pernah sekalipun memenangkan pemilu.
2. Secara akumulatif, dukungan terhadap ideologi nasionalisme senantiasa lebih besar dibandingkan terhadap ideologi Islam. Jika formalisasi politik dalam partai dipandang sebagai usaha Islam simbolis, dapat disimpulkan bahwa selama sekitar 50 tahun keberadaannya belum pernah berhasil mendudukkan tokoh Islam sebagai pemimpin tertinggi di negara ini (Indonesia).
3. Terdapat kekecualian untuk hasil pemilu 1999. Sekalipun partai-partai Islam tidak memenangkan pemilu, namun gabungan partai Islam yang didukung Golkar berhasil mendudukkan Gus Dur sebagai presiden. Namun apabila diperhatikan secara seksama, kekuatan-kekuatan partai Islam ternyata tidak dapat untuk mendudukkan pimpinannya sebagai presiden sendirian. Keberhasilan mendudukkan Gus Dur dalam kursi presiden melalui koalisi dengan kekuatan nasionalis juga (Golkar).

Barangkali keberhasilan ini adalah hasil koalisi Islam simbolis (dalam partai-partai Islam) dan Islam substantif (dalam partai Golkar).

4. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta perolehan suara partai Islam dalam 8 kali pemilu, adalah merupakan langkah yang tidak realistis jika kekuatan Islam akan berjalan sendirian tanpa berkoalisi dengan partai nasionalis untuk memenangkan persaingan politik, umpamanya dalam merebut posisi presiden Republik Indonesia periode 2004-2009.

DAFTAR PUSTAKA

Feith, Herbert., Lance Castles. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta, LP3ES.

Liddle, William R. 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik*. Jakarta. LP3ES.

Sumber Lain:

Holly Qur'an Versi 6.31 (CD-ROM)

www.kpu.go.id

Kompas, 13 Maret 2003.